



support to indonesia's
islands of integrity program
for sulawesi

CASE STUDY 3

Kota Bitung
Provinsi Sulawesi Utara

**BADAN PELAYANAN
PERIZINAN TERPADU DAN
PENANAMAN MODAL
DAERAH (BPPT-PMD)**

Agustus 2015



CASE STUDY 3

Kota Bitung
Provinsi Sulawesi Utara

BADAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU DAN PENANAMAN MODAL DAERAH (BPPT-PMD)

Agustus 2015

Cetakan Agustus 2015

Sebagian atau seluruh isi buku ini termasuk ilustrasinya boleh diperbanyak dengan syarat disebarakan secara gratis dengan mencantumkan sumbernya.

Proyek SIPS Kantor Jakarta:

Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
WTC 5 (Wisma Metropolitan I), 7th Floor
Jl. Jend.Sudirman Kav.29-31
Jakarta 12920
Tel: +62.21.5206207
Fax: +62.21.5206291

Proyek SIPS Kantor Makassar:

Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
Gedung Menara Bosowa, 14th Floor
Jl. Jend.Sudirman No.5
Makassar
Tel : +62.411 368 1205
Fax: +62.411 368 1206

Proyek SIPS Kantor Manado:

Support to Indonesia's Island of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)
Jl. Mangga No. 83
Sario Kotabaru
Manado 95114
Tel : +62. 431 842 896
Fax: +62. 431 854 426

DAFTAR ISI

| | |
|--|------|
| Daftar Isi | iv |
| Daftar Akronim | v |
| Sambutan Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada | vi |
| Sambutan Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi | vii |
| Sambutan Direktur Proyek Support to Indonesia’s Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) | viii |
| | |
| Latar Belakang | 1 |
| Tantangan dan Peluang | 5 |
| Langkah – Langkah yang Telah Diambil | 9 |
| Dampak dan Perubahan | 13 |
| Pembelajaran dan Rekomendasi | 17 |
| Keberlanjutan Reformasi | 19 |
| “Apa Kata Mereka” – Staff Pemerintah, LSM, Masyarakat | 20 |
| Langkah-Langkah Menuju Replikasi | 23 |

DAFTAR AKRONIM

| | |
|--------------------|--|
| BIMTEK | Bimbingan Teknis |
| BP2TPM | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal |
| BPPT - PMD | Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Daerah |
| DFATD | <i>Department of Foreign Affairs, Trade and Development</i> |
| DISDUKCAPIL | Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil |
| FGD | <i>Focus Group Discussion</i> |
| IKM | Indeks Kepuasan Masyarakat |
| INPRES | Instruksi Presiden |
| KEMENDAGRI | Kementerian Dalam Negeri |
| KEMENPAN RB | Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara & Reformasi Birokrasi |
| KEPRES | Keputusan Presiden |
| KKN | Korupsi Kolusi Nepotisme |
| KPK | Komisi Pemberantasan Korupsi |
| KUA | Kantor Urusan Agama |
| LKPP | Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa |
| LPSE | Layanan Pengadaan Secara Elektronik |
| LSM | Lembaga Swadaya Masyarakat |
| MOU | <i>Memorandum of Understanding</i> (Nota Kesepahaman) |
| OMS | Organisasi Masyarakat Sipil |
| PBJ | Pengadaan Barang dan Jasa |
| PERBUP | Peraturan Bupati |
| PERPRES | Peraturan Presiden |
| POKJA | Kelompok Kerja |
| SDM | Sumber Daya Manusia |
| SIPS | Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi |
| SKPD | Satuan Kerja Pemerintah Daerah |
| SOP | <i>Standard Operational Procedure</i> (Prosedur Operasional Standar) |
| SPSE | Sistem Pengadaan Secara Elektronik |
| SULSEL | Sulawesi Selatan |
| ULP | Unit Layanan Pengadaan |

Sambutan

Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada



Jeffrey Ong

Senior Development
Officer
Embassy of Canada
in Indonesia

Atas nama Department of Foreign Affairs, Trade and Development (DFATD) Kanada, adalah suatu kehormatan bagi saya untuk berbagi studi kasus mengenai Pencegahan Korupsi, untuk kepentingan masyarakat Indonesia pada umumnya; khususnya, lembaga pemerintah dan non-pemerintah yang terlibat dalam pencegahan korupsi.

Studi – Studi Kasus telah diproduksi sebagai salah satu hasil utama dari kemitraan antara DFATD Kanada dengan KPK, melalui proyek SIPS, di bawah fokus tematik pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di bawah Program Kerjasama Pembangunan Indonesia - Kanada, melalui pengalaman pelaksanaan proyek 10 pemerintah lokal di Sulawesi selama 3 tahun terakhir.

Adalah keyakinan kami bahwa untuk mensukseskan pencegahan korupsi, perlu adanya keterlibatan yang lebih luas dari lembaga pemerintah dan non-pemerintah. Dengan demikian, sangat penting untuk berbagi pelajaran dan praktik cerdas yang disajikan dalam Studi Kasus. Kami berharap bahwa sebagai hasil dari berbagi Studi Kasus kepada para pemangku kepentingan yang lebih luas, bisa ada kesadaran yang lebih baik dan apresiasi terhadap isu-isu dan tantangan di sekitar pencegahan korupsi, serta penyediaan pilihan untuk mengatasi pencegahan korupsi dengan mereplikasi praktik – praktik cerdas.

Sambutan

Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi

Puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala nikmat dan karunia-Nya, sehingga berbagai upaya yang kita lakukan bersama untuk membangun bangsa, khususnya dalam bidang pemberantasan korupsi, telah menunjukkan hasil-hasil yang cukup membanggakan.

Menyadari pentingnya upaya pencegahan korupsi untuk menghasilkan generasi bangsa yang berkualitas dan sejahtera, maka dibutuhkan upaya serius dari semua pihak untuk menyebarluaskan pengalaman dan praktik-praktik terbaik di bidang pelayanan publik ke seluruh penyelenggara pelayanan publik.

KPK mencatat bahwa pengadaan barang dan jasa pemerintah, administrasi kependudukan serta pelayanan perijinan merupakan kegiatan-kegiatan yang paling rawan terjadinya tindak pidana korupsi, yang telah

menjerat penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah. Dengan demikian, maka reformasi layanan publik di ketiga sektor tersebut diharapkan akan mengurangi peluang dan mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Buku Studi Kasus Pelayanan Publik merupakan dokumentasi dari reformasi layanan publik pada pengadaan barang dan jasa pemerintah, layanan administrasi kependudukan serta pelayanan perijinan terpadu yang dilakukan sejak tahun 2011 oleh Proyek SIPS (Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi) sebagai bentuk kerjasama antara KPK dengan Pemerintah Kanada melalui DFATD (Department of Foreign Affairs, Trade, and Development).

Dari dokumentasi ini dapat dipelajari berbagai tahap yang dilakukan, hambatan yang ditemui, solusi yang diambil, serta perbaikan yang dicapai oleh 10



Adnan Pandu Praja



Pimpinan Komisi
Pemberantasan Korupsi

Pemerintah Daerah di Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan dengan kondisi awal yang berbeda-beda agar dapat dijadikan referensi, mudah diikuti dan ditiru oleh pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Harapan saya semoga buku ini bermanfaat dalam menjalankan reformasi pelayanan publik demi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik, serta mengurangi peluang dan mencegah terjadinya korupsi. Mari kita bekerja demi terwujudnya Indonesia yang bebas korupsi.

Sambutan

Direktur Proyek Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)



Peter F. Walton

Direktur Proyek SIPS

Proyek SIPS sangat senang secara resmi meluncurkan publikasi resmi pertama proyek: 10 studi kasus dari perbaikan pelayanan publik di mitra pemerintah daerah kami.

SIPS atau **Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi** merupakan proyek bilateral yang didanai oleh Department of Foreign Affairs, Trade, and Development Canada (DFATD, sebelumnya CIDA). Komisi Pemberantasan Korupsi Indonesia (KPK) adalah mitra dalam proyek ini. Cowater International Inc. terpilih melalui proses yang kompetitif pada bulan Desember 2009 sebagai konsultan pelaksana proyek SIPS.

Mandat SIPS sehubungan dengan pemerintah daerah di Sulawesi adalah "untuk mengurangi peluang korupsi melalui peningkatan transparansi, akuntabilitas dan efisiensi

pelayanan publik terpilih, khususnya Kependudukan dan Catatan Sipil, PTSP dan PBJ". SIPS bekerja dengan 10 pemerintah daerah di Sulawesi, termasuk lima di Provinsi Sulawesi Utara (Provinsi Sulut, Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa dan Kabupaten Kepulauan Sangihe) dan lima di Sulawesi Selatan (Provinsi Sulsel, Kota Manado, Kabupaten Enrekang, Kabupaten Pinrang dan Kabupaten Tana Toraja). SIPS bekerja dengan perwakilan masyarakat sipil dan pemerintah dalam upaya menjembatani kesenjangan antara masyarakat sipil dan pemerintah dan memajukan kepentingan bersama dalam meningkatkan pelayanan publik dan mengurangi korupsi.

Kami juga mendukung KPK untuk memperkuat mandatnya dalam bidang pencegahan dan

meningkatkan kesadaran diantara para pemangku kepentingan Indonesia dan masyarakat luas mengenai upaya - upaya anti-korupsi. Selain itu kami bekerja sama dengan banyak lembaga nasional termasuk Kemendagri, LKPP, Kemenpan Reformasi Birokrasi, Kementerian Lingkungan Hidup, Ombudsman RI dan Bappenas untuk memastikan bahwa upaya kami bekerja di dalam dan mendukung keseluruhan kerangka peraturan perundang-undangan pemerintah.

Bermitra dengan KPK, SIPS menargetkan perubahan kelembagaan. Bantuan teknis merupakan salah satu bagian dari ini. Bagian terbesar yang sulit adalah mengubah paradigma, mengubah pola pikir kita untuk melihat peran pemerintah sebagai salah satu layanan dan mencoba menghidupkan kepercayaan bahwa tempat-tempat umum

di dalam kita untuk melayani masyarakat yang sama dengan cara yang jujur, transparan, dan kompeten.

Pola pikir, pergeseran paradigma atau, seperti yang dikatakan Presiden Joko Widodo "revolusi mental", merupakan pergeseran ke cara yang berbeda dalam melakukan bisnis, bukan bisnis seperti biasanya. Untuk berpindah dari pemerintahan ke orientasi pelayanan dan untuk lebih memahami hubungan antara korupsi dan pelayanan publik dan bagaimana korupsi melemahkan kita: ini adalah tantangan nyata yang kini kita hadapi.

Masing-masing dari 10 studi kasus ini menyoroti upaya setiap pemerintah sub-nasional untuk mencoba membuat perbedaan dalam kehidupan masyarakat, memperlakukan mereka dengan hormat, mematahkan budaya hak

pemerintah dan bergeser ke pelayanan publik yang baik dan benar.

Mudah-mudahan kita bisa menyepakati perlunya perubahan dan cara-cara untuk mewujudkannya. Pada akhirnya ini adalah tentang komitmen masing-masing untuk memegang janji pejabat terpilih dan staf pemerintah untuk bertanggung jawab atas janji mereka dan untuk mencontohi standar integritas dan kejujuran yang sama yang kita harapkan dari para pemimpin kita.



LATAR BELAKANG

SIPS, atau Proyek Dukungan bagi Program Kepulauan Indonesia Berintegritas untuk Sulawesi (Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi) didanai oleh Pemerintah Kanada melalui Departemen Luar Negeri, Perdagangan dan Pembangunan Kanada [Department of Foreign Affairs, Trade and Development Canada (DFATD Canada)]. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan pihak dari Indonesia yang menjadi rekanan dalam proyek ini. Cowater International Inc. terpilih melalui proses yang kompetitif di bulan Desember 2009 untuk menyediakan layanan konsultasi dan implementasi proyek SIPS.

Proyek ini memiliki dua tujuan luas. Yang pertama yaitu untuk mengidentifikasi, mengimplementasi dan menunjukkan praktik-praktik pencegahan korupsi yang lebih baik, sehubungan dengan upaya memperbaiki transparansi dan akuntabilitas. Yang kedua adalah untuk memperkuat peran KPK sebagai katalis dan mentor bagi inisiatif-inisiatif pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan sub-nasional. Secara keseluruhan, proyek ini akan berkontribusi kepada pengurangan korupsi melalui tata kelola pemerintahan dan praktik-praktik manajemen yang transparan dan akuntabel.

SIPS memiliki tiga hasil utama yang langsung terlihat: (1) praktik-praktik dan sistem-sistem yang lebih transparan dan akuntabel di tingkat pemerintahan sub-nasional (provinsi dan kabupaten/kota) yang terpilih; (2) kapasitas KPK yang diperkuat untuk mempengaruhi terjadinya perubahan di dalam pemerintahan daerah, dan (3) lingkungan yang lebih mendukung bagi berkurangnya korupsi melalui peningkatan kesadaran akan strategi-strategi pencegahan korupsi dan praktik-praktiknya. Tujuh puluh lima persen dari upaya proyek ini akan berfokus pada upaya peningkatan kapasitas pemerintahan di tingkat sub-nasional. Sisanya 25% dibagi antara peningkatan kapasitas KPK (15%) dan pendokumentasian serta diseminasi praktik-praktik terbaik dan pembelajaran dari semua kegiatan proyek (10%).

SIPS mendukung 10 pemerintah sub-nasional¹ di Sulawesi dan KPK melalui peran mereka masing-masing dalam memperkenalkan reformasi kunci tata kelola pemerintahan. Peran Cowater International Inc. adalah untuk mengelola proyek dalam kolaborasi erat dengan KPK. Pendekatan ini memerlukan rancangan dan penerapan metode dan alat-alat dengan cara yang berulang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi cara-cara yang paling efektif untuk memperkenalkan dan mempertahankan berbagai reformasi tata kelola pemerintahan. Mendokumentasikan dan mensistematiskan praktek yang paling sukses di pemerintah daerah yang berpartisipasi akan melengkapi KPK dengan alat-alat yang efektif dan strategi-strategi untuk memperluas praktik terbaik untuk pemerintah daerah lainnya di seluruh Indonesia.

Melalui pendekatan yang diambil oleh SIPS diakui bahwa keberlanjutan jangka panjang dari hasil proyek akan tergantung pada keberhasilan dalam pembangunan kapasitas dari beberapa mitra yang berbeda:

- Memperkuat kapasitas internal KPK untuk mengkatalisasikan reformasi tata kelola pemerintahan di tingkat sub-nasional dan terutama dalam Penelitian dan Pengembangan Direktorat Divisi Pencegahan;
- Bekerjasama dengan instansi pemerintah nasional yang relevan dalam mendukung kepatuhan pemerintah daerah terhadap hukum dan peraturan;
- Meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah daerah dan tim dalam melaksanakan dan mempertahankan reformasi pemerintahan; dan
- Mendorong OMS regional dan lokal untuk berpartisipasi dalam musyawarah kebijakan dan perumusan dan pengawasan masyarakat dalam kaitannya dengan rencana aksi pencegahan korupsi.

Penyiapan strategi, materi dan pelatihan dilakukan dengan menggabungkan metode perubahan manajemen dan pendekatan-pendekatannya. SIPS menambah nilai dengan menyusun inovasi yang diusulkan dalam proses perubahan adaptif dan dengan melibatkan para

¹ Provinsi SULSEL, Kota MAKASSAR, Kab ENREKANG, Kab PINRANG, Kab TANA TORAJA, Provinsi SULUT, Kota MANADO, Kab MINAHASA, Kota BITUNG, Kab Kepulauan SANGIHE

ahli teknis, baik nasional maupun internasional, yang berpengalaman di berbagai prinsip dan teknik perubahan manajemen.

Kemitraan dengan KPK

SIPS dilaksanakan berdasarkan kemitraan yang kolaboratif dengan KPK dan melibatkan KPK dalam penilaian kebutuhan untuk pengembangan kapasitas demi mendukung kegiatan-kegiatan pencegahan korupsi di tingkat pemerintahan daerah. Dukungan teknis diberikan dalam bentuk pengembangan, implementasi, dan pemantauan rencana aksi. Keterlibatan proaktif ini adalah elemen yang penting dalam memastikan kemitraan dan kepemilikan dari pihak Indonesia.

Kemitraan dengan KPK diharapkan sangat dekat, dengan KPK memainkan peran penting dalam menentukan dan membimbing proyek melalui konsultasi dan hubungan dengan semua Gugus Tugas, juga melalui Komite Pengarah Proyek (Project Steering Committee). Cowater juga melibatkan KPK dalam pemilihan ahli teknis yang diperlukan dalam rangka membangun kepemilikan dan untuk menerapkan dan mendemonstrasikan praktik-praktik perekrutan yang transparan.

Integrasi lintas isu

SIPS berkomitmen mendukung mitra-mitranya yaitu pemerintah, KPK dan organisasi masyarakat sipil untuk mengintegrasikan kesetaraan jender dan lingkungan hidup sesuai dengan kebijakan dan peraturan pemerintah Indonesia. Pengarusutamaan jender dilakukan dengan menganalisa kesenjangan dan kebutuhan perempuan dan laki-laki, dan memastikan bahwa pembangunan dan program pemerintah memberikan manfaat yang adil bagi laki-laki dan perempuan. Selain itu, dalam pengembangannya proyek SIPS juga berinisiasi untuk membangun kesadaran terkait isu lingkungan yang saat ini menjadi masalah pengarusutamaan (*mainstreaming issue*). Isu lingkungan menjadi hal yang sangat penting terutama dalam pengadaan barang dan jasa dan juga menjadi landasan dalam proses perizinan usaha.



Badan Pelayanan Perizinan & Penanaman Modal Kota Bitung





TANTANGAN DAN PELUANG

Ibukota Kota Bitung adalah Bitung, dengan luas wilayah daratan 302,89 km², dan jumlah penduduk 212.845 jiwa². Kota Bitung berbatasan dengan Kecamatan Likupang dan Kecamatan Dimembe (Kabupaten Minahasa Utara) di sebelah utara, Laut Maluku di sebelah selatan, Kecamatan Kauditan (Kabupaten Minahasa Utara) di sebelah barat, dan Laut Maluku dan Samudera Pasifik di sebelah timur.

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang terdapat di Kota Bitung sangat terbatas sehingga menjadikan tantangan tersendiri dalam penyelenggaraan pelayanan publik dengan skala dan kualitas yang lebih dari standar yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kota maupun yang dibutuhkan masyarakat. Keterbatasan – keterbatasan tersebut mencakup antara lain rendahnya kualitas pencari kerja dan ketidakmampuan dalam menyediakan jumlah dan kualitas angkatan kerja yang



² Sumber: situs Kementerian Dalam Negeri (<http://www.kemendagri.go.id/pages/profil-daerah/kabupaten/id/71/name/sulawesi-utara/detail/7172/kota-bitung>).

sesuai dengan permintaan pasar. Menyikapi situasi ini kegiatan-kegiatan pengembangan SDM telah dilakukan oleh Pemda Kota Bitung termasuk melalui kegiatan – kegiatan pendampingan yang dilakukan oleh proyek SIPS.

Berbagai penghargaan yang pernah diterima oleh Kota Bitung adalah Investment Award tahun 2009, Juara ke-3 Investasi Award se-Indonesia dan Piagam *Investment Award* tahun 2010, yang pada tahun 2010 juga menerima Citra Pelayanan Prima dari Presiden Republik Indonesia. Setelah menjadi salah satu daerah dampingan Proyek SIPS, Kota Bitung menerima penghargaan terbaik III untuk Integritas Pelayanan Publik se-Indonesia versi KPK pada tahun 2011, dan penghargaan terbaik I untuk penghargaan yang sama pada tahun 2012.

Proyek SIPS membuka peluang bagi Pemda Kota Bitung untuk meningkatkan kualitas SDM dan memperbaiki kualitas pelayanan BPPT-PMD. Meskipun banyak tantangan yang dihadapi oleh Pemerintah Kota Bitung, staff pemerintah daerah, pejabat terpilih dan perwakilan masyarakat sipil sehubungan dengan perilaku etis, Pemerintah Kota Bitung telah berkomitmen dan mengambil langkah - langkah yang perlu untuk mengurangi praktik korupsi dan menggeser budaya kerja dari proses birokrasi yang lambat dan berbelit - belit menjadi layanan publik yang efektif dan efisien dengan kinerja staff yang memuaskan.



OLIEVE

PENERIMAAN BERKAS

NELA



RUANG
IBU MENYUSUI

RUANG
PENGANTARAN



PENYERAHAN IZIN





LANGKAH - LANGKAH YANG TELAH DIAMBIL

Kerjasama Proyek SIPS di Kota Bitung dilakukan berdasarkan kesepakatan bersama yang tertuang dalam STA (*Subsidiary Technical Agreement*), yang ditindaklanjuti dengan teknis pelaksanaan yang tertuang dalam rencana aksi pada sektor pengadaan barang dan jasa, sektor perizinan dan sektor kependudukan dan pencatatan sipil.

Pembentukan BPPT-PMD Kota Bitung dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, Undang-Undang No. 23 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Undang-Undang No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan Peraturan Daerah Kota Bitung No. 20 Tahun 2008 yang telah direvisi dengan PERDA Kota Bitung No. 12 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, lembaga teknis daerah dan lembaga lain Kota Bitung.



Untuk meningkatkan layanan publik khususnya pada sektor Perizinan maka Pemerintah Kota Bitung mengeluarkan Peraturan Walikota Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Sistem dan Prosedur Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bitung yang diganti dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 19 Tahun 2013 mengenai Standar Operasional Prosedur BPPT & PMD.

Kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan di Kota Bitung mengharuskan penanganan yang lebih baik lagi untuk Perizinan dan Penanaman Modal, sehingga memunculkan Peraturan Daerah Kota Bitung No. 06 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penanaman Modal Dalam Negeri dan Penanaman Modal Asing, dan Peraturan Daerah Kota Bitung No. 7 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu di Kota Bitung.

Regulasi lainnya yang telah diterbitkan oleh PEMKOT Bitung dalam rangka menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi dan akselerasi pembangunan kota Bitung yang sangat cepat dan dinamis yaitu (1) Peraturan Walikota Bitung No. 45 Tahun 2009 yang direvisi dengan Peraturan Walikota Bitung Nomor 43 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja BPPT - PMD Kota Bitung, (2) Peraturan Daerah Kota Bitung No. 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu. Dalam kerangka kepedulian terhadap lingkungan, SIPS telah melakukan beberapa upaya seperti Pengadaan Barang dan Jasa yang ramah lingkungan dengan menekankan pentingnya izin lingkungan sebagai persyaratan dari izin usaha dan juga memasukkan beberapa perizinan terkait isu lingkungan ke dalam PTSP.

**RUANG
PENGADUAN**





NELA

PENERIMAAN BERKAS

DIWAJIBKAN
MEMILIKI SURAT PENERIMAAN BERKAS
DARI KEMENTERIAN



YUAN

OLIEVE





DAMPAK DAN PERUBAHAN

Jumlah Pelayanan Perizinan di BPPT-PMD Kota Bitung adalah sebanyak 25 izin sektoral dan 9 izin penanaman modal. Banyaknya jumlah perizinan ini berdampak luar biasa terhadap roda perekonomian dan investasi di Kota Bitung.

25 izin sektoral tersebut adalah:

| No. | Izin Sektoral |
|-----|---|
| 1 | Izin Mendirikan Bangunan (IMB); |
| 2 | Izin Gangguan (HO); |
| 3 | Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol (IPTMB); |
| 4 | Izin Trayek; |
| 5 | Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP); |
| 6 | Tanda Daftar Perusahaan (TDP); |
| 7 | Tanda Daftar Gudang (TDG); |
| 8 | Surat Izin Tempat Usaha (SITU); |
| 9 | Izin Usaha Industri (IUI); |
| 10 | Tanda Daftar Industri (TDI); |
| 11 | Surat Izin Usaha Perikanan; |
| 12 | Surat Izin Penangkapan Ikan; |
| 13 | Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan; |
| 14 | Surat Izin Usaha Pariwisata; |

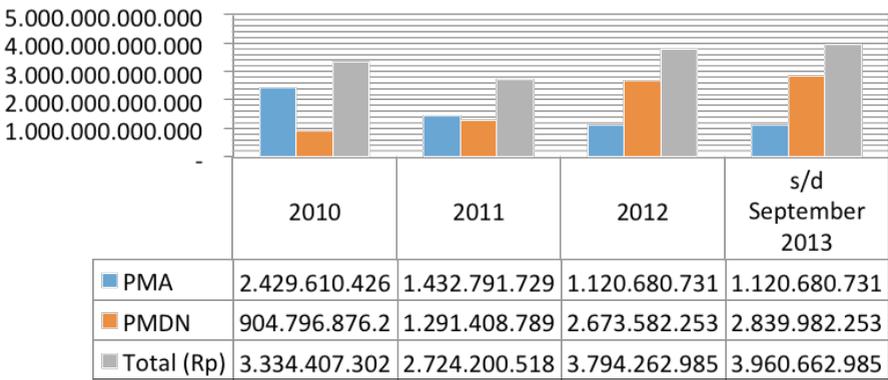
| No. | Izin Sektoral |
|-----|---|
| 15 | Surat Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK); |
| 16 | Surat Izin Perusahaan Pengeboran Air Bawah Tanah (SIPPAT); |
| 17 | Surat Izin Pengusahaan/Pemakaian Air Tanah (SIPA); |
| 18 | Izin Penyaluran Bahan Bakar Minyak (BBM); |
| 19 | Izin Pembuangan Air Limbah; |
| 20 | Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT); |
| 21 | Izin Penyaluran Bahan Bakar Khusus (BBK); |
| 22 | Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan; |
| 23 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Sendiri/ Izin Operasi (IO); dan |
| 24 | Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik Untuk Kepentingan Umum (IUPTL); |
| 25 | Izin Tempat Penyimpanan Sementara Limbah B3 |

9 izin penanaman modal tersebut adalah:

| NO. | IZIN SEKTORAL |
|-----|----------------------------------|
| 1 | Izin Prinsip Penanaman Modal |
| 2 | Izin Prinsip Perluasan Pm |
| 3 | Izin Perluasan Pm |
| 4 | Izin Prinsip Penggabungan/Merger |
| 5 | Izin Usaha |
| 6 | Izin Usaha Perluasan |
| 7 | Izin Usaha Perubahan |

| NO. | IZIN SEKTORAL |
|-----|--------------------------------|
| 8 | Izin Usaha Penggabungan/Merger |
| 9 | Izin Pembukaan Kantor Cabang |

Jumlah investasi yang telah di proses di Kota Bitung sampai dengan September 2013 adalah:



Grafik diatas menunjukkan peningkatan investasi yang berdampak pada meningkatnya roda perekonomian masyarakat Kota Bitung. Peningkatan ini dicapai melalui adanya perubahan dari sistem lama yang berfokus pada jumlah layanan menjadi sistem yang berpusat pada kualitas pelayanan yang didukung oleh penganggaran dan regulasi yang memadai dan baik.





PEMBELAJARAN DAN REKOMENDASI

Kota Bitung dijadikan pusat belajar (*learning center*) oleh Kabupaten/Kota di daerah Sulawesi karena pencapaian – pencapaian yang telah dihasilkan. SIPS mempertajam keberhasilan Kota Bitung dengan strategi dan pengembangan kapasitas SDM, pengembangan SOP, sistem pelayanan yang lebih berkualitas, penataan infrastruktur Kantor Layanan Perizinan termasuk penyediaan ruang pengaduan dan ruang khusus untuk wanita dan bayi, dan peningkatan teknologi dan informasi, seperti pengadaan server dan pemutakhiran peralatan komputer.

Pembelajaran dan rekomendasi yang bisa diambil dari berbagai kemajuan yang telah dicapai dalam reformasi BPPT-PMD Kota Bitung adalah:

- Komitmen dan kepemimpinan Kepala BPPT-PMD dalam mendayagunakan sumberdaya yang ada baik yang disediakan melalui Proyek SIPS dan yang bersumber dari APBD
- Pengembangan staf lewat pelatihan dan lokakarya dan menindaklanjuti rekomendasi yang dihasilkan dari pelatihan dan lokakarya



Badan Pelayanan

**Penanaman
Kot**





KEBERLANJUTAN REFORMASI

Hal – hal penting yang perlu diperhatikan dalam keberlanjutan reformasi adalah:

1. Kemauan politik, kepemimpinan, dan dukungan dari semua aktor yang terlibat dalam proses pembangunan
2. Berjaring dengan mitra strategis (akademisi, media, mitra bisnis, LSM / OMS) untuk mendukung pelaksanaan program
3. Pembangunan kapasitas yang berkelanjutan untuk pemerintah daerah dan mitra strategis

Diharapkan hal – hal tersebut diatas dapat menjadi landasan bagi perbaikan dan keberlanjutan reformasi birokrasi. Permasalahan dan hambatan yang terjadi selama pelaksanaan pelayanan dari tingkatan mikro - administrasi (operasionalisasi program reformasi birokrasi) sampai ke tataran makro – administrasi (struktur kelembagaan pengarah reformasi birokrasi) juga harus diidentifikasi dan diselesaikan.

“

Keberhasilan BPPT & PMD Kota Bitung adalah merupakan kerja keras dari seluruh unsur terkait termasuk didalamnya masyarakat dan hal ini patut kita syukuri bahwa pelayanan publik di Kota Bitung khususnya di Pokja PTSP telah membuahkan hasil dari komitmen yang begitu kuat untuk memberantas korupsi pada tubuh SKPD, Pelayanan Publik, dan diharapkan perhatian Pemerintah Kota harus tetap dijalankan dan bukan hanya sekedar berbangga diri karena penghargaan yang selalu diterima tetapi tetap berbenah diri menjadi yang lebih baik”.

Petrus Rumbayan dari DMS



sips





LANGKAH-LANGKAH MENUJU REPLIKASI

Langkah – langkah menuju replikasi dapat dibagi ke dalam dua tahap yaitu tahap persiapan dan tahap replikasi.

Langkah – langkah yang dibutuhkan selama tahap persiapan adalah:

1. Penilaian mengenai inovasi apa yang akan direplikasi.
2. Penilaian situasi.
3. Pelibatan pemangku kepentingan.
4. Membangun kemitraan dengan pihak-pihak yang akan terlibat dalam proses replikasi inovasi.

Langkah – langkah yang diperlukan selama tahap replikasi:

1. Membentuk Gugus Tugas dan Kelompok Kerja untuk mengimplementasikan dan memonitoring replikasi.
2. Membangun rencana kerja untuk mereplikasi inovasi.
3. Membangun kapasitas melalui pelatihan, magang, dan sebagainya untuk para pelaksana replikasi.
4. Memonitoring perkembangan.
5. Memastikan keberlanjutan.

Promosi yang berkesinambungan dan kegiatan sosialisasi yang terencana akan menjadikan BPPT & PMD Kota Bitung tetap mengedepankan pelayanan publik yang terbaik. Hal ini harus ditularkan kepada SKPD Pelayanan Publik lainnya baik di Kota Bitung maupun untuk Kota/Kabupaten lainnya di Sulut dan provinsi tetangga lainnya dengan promosi dan sosialisasi untuk berbagi praktik-praktik terbaik yang sudah ada.



Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS)

Support to Indonesia's Islands of Integrity Program for Sulawesi (SIPS) is a 5 year DFATD project, implemented by Cowater, designed to reduce opportunities for corruption in 10 sub-national governments in Sulawesi through increased implementation of transparent and accountable practices. The Project is also providing assistance to the Indonesia Corruption Eradication Commission (KPK) to help strengthen its role in corruption prevention.

For more information visit

www.sips.or.id
www.cowater.com

**Support to Indonesia's Island of
Integrity Program for Sulawesi (SIPS)**
WTC 5 (Wisma Metropolitan I), 7th Floor
Jl. Jend.Sudirman Kav. 29-31, Jakarta 12920
Tel: +62.21.5206207 Fax: +62.21.5206291